


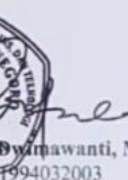


LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEKOLAH VOKASI	Jalan Gubernur Mochtar Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275 Telepon/Faksimile (024) 7471379 Laman: www.vokasi.undip.ac.id Pos-el: vokasi[at]undip.ac.id
No	: 462/UN7.M2.1/KM/V/2026	Semarang, 01 September 2025
Lampiran	: -	
Hal	: Surat Permohonan Izin Penelitian	
 Yth. Kepala Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon Jl. Pengampon No.4, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45111		
Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya, bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan penelitian untuk memperoleh data, baik dari Instansi Pemerintah maupun Swasta. Mohon sekiranya dapat diberikan izin bagi mahasiswa S.Tr. Akuntansi Perpajakan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro untuk dapat melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.		
Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:		
Nama	: Salma Aulia Fitri	
NIM	: 40011422650189	
Alamat Rumah	: Bukepin II Blok B2 No 6 RT/RW 001/006, Kec. Talun, Kab. Cirebon	
Jurusan	: S.Tr. Akuntansi Perpajakan	
Judul TA	: Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Tahun 2017-2025	
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terimakasih.		
		a.n. Dekan, Wakil Dekan I  Dr. Ida Hana Dwimawanti, M.M. NIP. 196708191994032003
Tembusan : Yth. . 1. Dekan Sekolah Vokasi 2. Kaprodi S.Tr. Akuntansi Perpajakan		
https://cso.vokasi.undip.ac.id/dashboard/cetak_p.php?r=S2y\$10\$HvdUly.1MKJlYoXDDGdZdUWU1T0ChO3W3kFz9JMVpVvHy6OvQvoo		

Lampiran 2 Surat Izin Pengambilan Data

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEKOLAH VOKASI	Jalan Gubernur Mochtar Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275 Telepon/Faksimile (024) 7471379 Laman: www.vokasi.undip.ac.id Pos-el: vokasi@undip.ac.id						
No : 17/UN7.M2.1/PP/V/2026 Lampiran : - Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data	Semarang, 02 Februari 2026							
Yth. Kepala Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon Jl. Pengampon No.4, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45111								
Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Program Studi S.Tr. Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tersebut dibawah ini :								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 60%;">NAMA</th> <th style="width: 30%;">NIM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Salma Aulia Fitri</td> <td style="text-align: center;">40011422650189</td> </tr> </tbody> </table>			NO	NAMA	NIM	1	Salma Aulia Fitri	40011422650189
NO	NAMA	NIM						
1	Salma Aulia Fitri	40011422650189						
Maka dengan ini kami mengajukan permohonan ijin bagi mahasiswa tersebut untuk melakukan pengambilan data di Instansi Saudara yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2026. Bentuk Kegiatan : pengambilan data sekunder Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.								
a.n. Dekan Wakil Dekan I  Dr. Ida Hayu Swinawanti, M.M. NIP. 196708191994032003								
Tembusan : Yth. 1. Dekan Sekolah Vokasi Undip 2. Kaprodi S.Tr. Akuntansi Perpajakan								
http://cso.vokasi.undip.ac.id/download/http://cso.vokasi.undip.ac.id/download/surat-permohonan-izin-pengambilan-data/report.pdf/report.pdf								

Lampiran 3 Diterima Permohonan Izin Penelitian


PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Pengampon No. 4, Cirebon 45111 Telepon (0231) 204066
 Faks. (0231) 205454 Email bpkpd@cirebonkota.go.id
 Website bpkpd.cirebonkota.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 895.4/ 419 /Sekret

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: YUDHI SETIADI, S.Sos.
NIP	: 197412312006041051
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Instansi	: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :


Nama	: Salma Aulia Fitri
NIM	: 40011422650189
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro Semarang
Fakultas/ Jurusan	: S.Tr. Akuntansi Perpajakan

Telah melaksanakan kegiatan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, terhitung mulai tanggal 1 September 2025 s.d 31 Desember 2025.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Cirebon, 22 Mei 2026

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
 PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON
 Sekretaris,
 u.b
 Ka Sub Bag Umum


 YUDHI SETIADI, S.Sos
 NIP. 19741231 200604 1 051

Lampiran 4 Data Excel Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Cirebon Tahun 2017-2025

TARGET DAN REALISASI PAJAK RESTORAN 2017-2025			
Dalam Ribuan Rupiah			
Periode	TAHUN	TARGET PAJAK RESTORAN	REALISASI PAJAK RESTORAN
Sebelum Pandemi	2017	28.010.000	35.577.560
	2018	43.730.000	47.117.953
	2019	55.106.050	56.228.373
Saat Pandemi	2020	46.655.141	38.827.280
	2021	52.890.141	41.809.270
	2022	54.640.141	58.175.908
Sesudah Pandemi	2023	61.609.648	64.995.600
	2024	80.993.498	69.386.168
	2025	80.993.498	75.394.306
TOTAL		504.628.118	487.512.418

Sumber: BPKPD Kota Cirebon

Lampiran 5 Data Excel Target dan Realisasi PAD Kota Cirebon Tahun 2017-2025

TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2017-2025			
Dalam Ribuan Rupiah			
PERIODE	TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD
SEBELUM PANDEMI	2017	469.478.145	443.929.980
	2018	481.290.590	440.436.421
	2019	510.852.118	434.208.148
SAAT PANDEMI	2020	497.946.225	437.208.148
	2021	517.307.458	401.086.141
	2022	517.922.845	540.343.015
PASCA PANDEMI	2023	544.536.693	532.653.850
	2024	653.938.370	559.128.776
	2025	757.697.317	662.422.279

Sumber: BPKPD Kota Cirebon

Lampiran 6 Data Excel Realisasi Pajak Daerah Kota Cirebon Tahun 2017-2025

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2017-2025 (1) [Protected View] - Excel

File Home WPS PDF Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Developer Help Tell me what you want to do

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

B2 REALISASI JENIS PAJAK DAERAH TAHUN 2017-2025

REALISASI JENIS PAJAK DAERAH TAHUN 2017-2025										
Dalam Ribu Rupiah										
NO	JENIS PAJAK	Sebelum Pandemi			Saat Pandemi			Setelah Pandemi		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	HOTEL	13.530.000	16.982.073	18.517.200	11.341.824	12.381.240	18.091.945	19.375.024	20.438.886	19.280.926
2	RESTORAN	35.577.560	47.117.953	56.228.373	38.827.280	41.809.270	58.175.908	64.995.600	69.386.168	75.394.306
3	HIBURAN	7.141.275	9.517.479	9.686.044	3.405.110	2.143.813	6.567.048	8.067.424	8.709.585	8.221.797
4	REKLAMIE	5.713.502	6.257.885	5.725.347	4.917.493	5.207.801	6.111.260	5.540.049	7.053.877	9.203.941
5	PENERANGAN JALAN	23.043.385	24.224.171	24.805.285	24.040.858	23.273.850	26.304.552	27.474.574	38.135.924	38.739.920
6	PARKIR	3.181.422	4.428.412	5.010.157	2.767.487	2.596.113	3.827.559	4.867.182	2.400.143	2.409.392
7	AIR BAWAH TANAH	68.558	68.884	67.893	65.411	62.483	58.421	59.328	122.939	329.020
8	PBB-P2	27.455.987	32.890.973	33.767.102	33.511.969	35.263.920	35.566.287	35.435.643	48.883.174	44.499.857
9	BPHB	40.562.836	34.302.720	34.163.168	35.051.292	42.156.543	37.296.877	52.047.071	30.927.599	38.554.669
		156.274.524	175.790.552	187.970.568	153.928.724	164.895.033	191.999.857	217.861.896	226.058.294	226.633.821

PAD PAJAK DAERAH PAJAK RESTORAN

Sumber: BPKPD Kota Cirebon

Lampiran 7 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara dengan Staff BPKPD bidang PPEPD

Pewawancara : Salma Aulia Fitri

Narasumber

Nama : Pia Lida Erika

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) Kota Cirebon

Jabatan : Staf bidang PPEPD

Waktu Wawancara : Jumat, 27 Maret 2025, pukul 09.00 s/d selesai

Tempat Wawancara : Kantor BPKPD Kota Cirebon

Efektivitas Pajak Restoran

1.	Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Restoran di Kota Cirebon selama periode 2017–2025?
2.	Mengapa realisasi penerimaan Pajak Restoran pada beberapa tahun dapat melebihi target yang telah ditetapkan?
3.	Faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya realisasi penerimaan Pajak Restoran?
4.	Strategi apa yang dilakukan BPKPD untuk mencapai atau meningkatkan target penerimaan Pajak Restoran?
5.	Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Cirebon selama ini?
6.	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPKPD terhadap wajib pajak restoran?

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

7.	Mengapa kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Cirebon masih tergolong kecil meskipun penerimaannya cukup besar?
8.	Apakah peningkatan penerimaan Pajak Restoran selalu diikuti oleh peningkatan kontribusi terhadap PAD?

9.	Bagaimana posisi Pajak Restoran dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya di Kota Cirebon?
10.	Upaya apa yang perlu dilakukan agar kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD dapat meningkat?
7.	Mengapa kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Cirebon masih tergolong kecil meskipun penerimaannya cukup besar?
8.	Apakah peningkatan penerimaan Pajak Restoran selalu diikuti oleh peningkatan kontribusi terhadap PAD?

Tren Sebelum, Saat, dan Setelah Pandemi serta Kemandirian Fiskal Daerah

11.	Apa yang mendorong pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran sebelum pandemi Covid-19?
12.	Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Restoran di Kota Cirebon?
13.	Faktor apa yang mempengaruhi pemulihan penerimaan Pajak Restoran setelah pandemi Covid-19?
14.	Apakah tren efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah?
15.	Seberapa besar peran Pajak Restoran dalam mendukung kemandirian fiskal daerah Kota Cirebon?
16.	Mengapa optimalisasi penerimaan Pajak Restoran penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah?
17.	Apakah Pajak Restoran masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD Kota Cirebon di masa mendatang?
18.	Apa harapan BPKPD terhadap perkembangan Pajak Restoran ke depannya?

Lampiran 8 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara dengan Staff BPKPD bidang PPEPD

Pewawancara : Salma Aulia Fitri

Narasumber

Nama : Pia Lida Elika

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) Kota Cirebon

Jabatan : Staf bidang PPEPD

Waktu Wawancara : Jumat, 27 Maret 2026, pukul 09.00 s/d selesai

Tempat Wawancara : Kantor BPKPD Kota Cirebon

T	Assalamu'alaikum, Ibu. Maaf mengganggu waktunya ya, Ibu.
J	Waalaikumsalam, iya gapapa neng, santai aja.
T	Saya mau izin tanya-tanya sedikit, Ibu, terkait pajak restoran di Kota Cirebon. Soalnya saya masih ingin memahami lebih dalam bagaimana perkembangan pajak restoran dari tahun ke tahun, terutama pada periode 2017 sampai 2025.
J	Oh iya, boleh. Gimana-gimana?

[Efektivitas Pajak Restoran]

1.	T	Kalau dari pihak BPKPD sendiri, bagaimana Ibu melihat perkembangan penerimaan Pajak Restoran dari tahun 2017 sampai 2025 secara umum?
	J	Kalau secara umum, penerimaan Pajak Restoran perkembangannya cukup bagus ya. Sebelum pandemi, penerimaannya naik terus tiap tahun karena usaha kuliner di Cirebon makin banyak. Banyak kafe, rumah makan, sama restoran baru bermunculan. Jadi otomatis penerimaan pajaknya ikut naik. Tapi waktu pandemi sempat turun cukup jauh karena aktivitas masyarakat dibatasi. Setelah pandemi mulai membaik, penerimaannya perlahan naik lagi sampai sekarang.

2.	T	Dari hasil data yang saya peroleh, realisasi penerimaan Pajak Restoran beberapa tahun ada yang melebihi target, bahkan sampai 127% di tahun 2017. Menurut Ibu, kenapa hal itu bisa terjadi?
	J	Menurut saya perkembangan usaha restoran cukup pesat. Kadang target yang ditetapkan di awal tahun ternyata lebih kecil dari realisasinya, karena konsumsi masyarakat meningkat dan usaha kuliner juga makin berkembang pesat. Jadi penerimaannya bisa melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3.	T	Faktor apa saja yang memengaruhi tinggi rendahnya realisasi Pajak Restoran itu, Bu?
	J	Banyak faktornya. Kondisi ekonomi masyarakat berpengaruh, tingkat konsumsi masyarakat juga berpengaruh. Selain itu, perkembangan usaha restoran dan kepatuhan wajib pajak juga sangat berpengaruh. Kalau kondisi ekonominya bagus, restoran ramai, penerimaan pajaknya juga ikut meningkat.
4.	T	Kalau dari sisi BPKPD sendiri, strategi apa yang biasanya dilakukan untuk mencapai atau bahkan melampaui target penerimaan Pajak Restoran, Bu?
	J	Biasanya kita lakukan monitoring dan pengawasan ke wajib pajak restoran. Terus ada pendataan usaha baru juga, supaya usaha-usaha yang belum terdaftar bisa masuk ke basis data wajib pajak. Selain itu, kita rutin sosialisasi terkait kewajiban pajak daerah supaya wajib pajak lebih paham pentingnya bayar pajak tepat waktu.
5.	T	Kalau untuk tingkat kepatuhan wajib pajak restoran sendiri, bagaimana kondisinya selama ini, Bu?
	J	Secara umum sudah cukup baik, tapi memang masih ada beberapa yang telat bayar atau pelaporan omzetnya belum maksimal. Jadi pengawasan tetap harus dilakukan supaya penerimaan pajaknya optimal.
6.	T	Pengawasannya biasanya seperti apa, Bu?
	J	Biasanya ada monitoring pelaporan omzet, pemeriksaan lapangan, sama evaluasi pembayaran pajak juga. Kadang petugas juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan data usaha restoran sudah sesuai dengan yang dilaporkan.

[Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD]

7.	T	Bu, dari hasil penelitian saya, efektivitasnya tergolong bagus tapi kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Cirebon masih tergolong kurang, rata-rata sekitar 10 persen. Menurut Ibu, kenapa bisa begitu?
----	---	---

	J	Karena PAD itu sumbernya bukan hanya dari Pajak Restoran saja, neng. Ada pajak lain seperti BPHTB, PBB-P2, pajak hotel, pajak reklame, retribusi daerah, sama pendapatan daerah lainnya juga. Jadi walaupun penerimaan Pajak Restoran besar, total PAD juga besar. Makanya kontribusinya masih tergolong kecil atau fluktuatif kalau dilihat dari persentasenya terhadap total PAD.
8.	T	Berarti kalau penerimaan Pajak Restoran naik, belum tentu kontribusinya terhadap PAD langsung besar juga ya, Bu?
	J	Iya betul, neng. Karena PAD itu sumbernya banyak, bukan cuma dari Pajak Restoran saja. Jadi walaupun Pajak Restoran penerimaannya bagus, kontribusinya bisa saja masih kecil kalau pendapatan dari sektor lain juga ikut besar.
9.	T	Kalau dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya, Pajak Restoran termasuk yang besar atau tidak, Bu?
	J	Iya, termasuk yang terbesar. Bahkan sejak tahun 2018 Pajak Restoran menjadi penyumbang pajak daerah paling tinggi di Kota Cirebon dibandingkan beberapa jenis pajak lainnya. Sebelumnya yang terbesar itu BPHTB, tapi setelah 2018 Pajak Restoran lebih dominan.
10.	T	Menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan supaya kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD bisa lebih meningkat ke depannya?
	J	Yang paling penting penerimaan pajaknya harus terus dioptimalkan. Perluasan basis data wajib pajak juga perlu, supaya usaha kuliner yang belum terdaftar bisa ikut berkontribusi. Selain itu pengawasan dan sosialisasi ke pelaku usaha harus terus ditingkatkan supaya kepatuhan wajib pajaknya makin baik dan kontribusinya terhadap PAD bisa lebih besar.

[Tren Sebelum, Saat, dan Setelah Pandemi serta Kemandirian Fiskal]

11.	T	Berdasarkan data yang ada, Penerimaan pajak restoran sebelum pandemi itu tinggi, apa yang mendorong pertumbuhannya saat itu ya Bu?
	J	Sebelum pandemi pertumbuhannya cukup signifikan tiap tahun. Soalnya waktu itu sektor kuliner lagi berkembang pesat, mobilitas masyarakat tinggi, dan banyak tempat makan baru yang bermunculan. Konsumsi masyarakat di sektor restoran juga tinggi karena kondisi ekonominya mendukung.
12.	T	Di tahun 2020 dan 2021, penerimaan Pajak Restoran turun cukup besar. Itu karena dampak pandemi Covid-19, Bu?
	J	Iya betul, sangat berpengaruh. Waktu pandemi banyak pembatasan aktivitas masyarakat. Restoran banyak yang sepi bahkan ada yang

		tutup sementara. Jam operasional juga dibatasi, daya beli masyarakat menurun, jadi omzetnya turun dan penerimaan pajaknya ikut turun cukup besar dibanding tahun sebelumnya.
13.	T	Lalu Bu mulai tahun 2022 sd 2025, penerimaan Pajak Restoran kembali naik. Faktor apa yang paling mempengaruhi pemulihan tersebut?
	J	Karena aktivitas masyarakat mulai normal kembali. Terus kita juga lebih meningkatkan monitoring dan pendataan wajib pajak restoran yang sudah mulai aktif kembali. Selain itu sektor kuliner memang cepat pulih karena masyarakat mulai banyak beraktivitas lagi di luar. Sekarang malah makin banyak restoran dan kafe baru yang bermunculan.
14.	T	Bu, dari hasil analisis saya, tren efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah dari waktu ke waktu. Apakah BPKPD juga melihat hal yang sama?
	J	Penerimaan Pajak Restoran itu memang sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi bagus, konsumsi di sektor restoran naik, penerimaan pajaknya juga ikut naik. Begitupun sebaliknya, kalau ada tekanan ekonomi seperti pandemi, penerimaannya langsung terasa turun. Makanya kondisi ekonomi daerah jadi faktor yang sangat mempengaruhi tren penerimaan Pajak Restoran dari tahun ke tahun.
15.	T	Bu, berdasarkan teori yang saya gunakan terkait kemandirian fiskal daerah (Peneliti menjelaskan teori: yang dimaksud yaitu kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan dari pendapatan sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat), menurut Ibu, seberapa besar peran Pajak Restoran dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Cirebon?
	J	Perannya cukup penting ya, neng. Pajak Restoran itu salah satu sumber PAD yang nilainya cukup besar dan terus berkembang. Kalau penerimaannya bagus, otomatis PAD ikut meningkat, dan daerah jadi lebih mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik dari pendapatan sendiri. Walaupun kontribusinya belum dominan karena PAD punya banyak sumber, tetapi pajak restoran tetap jadi salah satu komponen yang strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, apalagi dengan potensi kuliner Cirebon yang terus berkembang.
16.	T	Berarti optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk Pajak Restoran, menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kota Cirebon ya, Bu?
	J	Iya betul, neng. Kalau penerimaan pajak daerah meningkat, pemerintah daerah jadi lebih terbantu untuk pembangunan dan kebutuhan daerah tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

		Bukan cuma pemerintahnya saja yang berperan, tapi masyarakat dan pelaku usaha juga harus punya kesadaran untuk bayar pajak. Karena pajak itu nantinya akan kembali lagi ke masyarakat, misalnya untuk fasilitas umum dan pelayanan daerah. Nah dari sisi BPKPD, pengawasan dan pendataan wajib pajak terus kita tingkatkan, apalagi usaha kuliner di Kota Cirebon sekarang makin banyak. Sistem pembayaran dan pelaporan pajak juga sudah lebih digital, jadi lebih membantu pengawasan penerimaan pajak.
17.	T	Menurut Ibu, Pajak Restoran masih punya potensi besar untuk ke depannya tidak?
	J	Menurut saya masih sangat besar ya. Karena usaha kuliner di Kota Cirebon terus berkembang sampai sekarang. Cirebon juga dikenal sebagai kota kuliner, jadi aktivitas masyarakat di sektor restoran tetap tinggi. Jadi peluang peningkatan penerimaan Pajak Restoran masih cukup bagus ke depannya.
18.	T	Kalau harapan dari BPKPD sendiri untuk Pajak Restoran ke depannya apa, Bu?
	J	Harapannya penerimaan Pajak Restoran terus meningkat dan kepatuhan wajib pajaknya semakin baik, supaya bisa membantu peningkatan PAD Kota Cirebon dan mendukung pembangunan daerah dan juga semoga potensi kuliner yang ada bisa dimaksimalkan lagi.

T	Baik Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan membantu saya untuk penjelasan dan jawabannya. Sangat bermanfaat untuk penelitian saya.
J	Iya neng, gapapa santai aja. Semoga skripsinya lancar ya, semangat terus.
T	Siap, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Assalamu'alaikum.
J	Walaikumsalam neng, hati-hati di jalan ya.

Rekaman Dokumentasi

Cirebon, 27 Maret 2026

Informan



<https://drive.google.com/file/d/1tLZPz5WvVDc9hVz6p8RfZqb5CqAwK89J/view?usp=drivesdk>

Pia Lida Erika

Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian di BPKPD Kota Cirebon

- Dokumentasi Pengajuan Permohonan Penelitian



- Dokumen wawancara dengan Staff BPKPD (*Ibu Pia Lida Elika*)

